

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*, STRUKTUR KEPEMILIKAN, MANAJEMEN LABA, DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Fanny Richa Noviyanti¹, Eva Anggra², dan Ibnu Muttaqin³

¹Program Studi Akuntansi

^{2,3}Program Studi Manajemen Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of corporate social responsibility disclosure, ownership structure, earnings management, and leverage toward tax aggressiveness. The population in this research are all companies listed on BEI with coal mining company as a sampel. Using purposive sampling as the sampling technique, 6 companies are selected as samples. The reasearch period used is 5 years period. Data analysis technique used in this research is multiple linear regression, which previously performed the descriptive statistics, the classic assumption test, and hypothesis testing. The results of this research in the first hypothesis shows that corporate social responsibility disclosure, ownership structure, earnings management, and leverage have no effect simultaneously toward tax aggressiveness with significance level of 0,482. The second hypothesis showed the corporate social responsibility disclosure has no significant effect toward tax aggressiveness on the level of 0,453. The third showed the ownership structure has no significant effect toward tax aggressiveness on the level of 0.182. The fourth hypothesis showed that earnings management has no significant effect toward tax aggressiveness on the level of 0.946, and the fifth hypothesis show leverage has no significant effect toward tax aggressiveness on the level of 0,295.

Keywords: *corporate social responsibility (CSR), ownership structure, earnings management, leverage, tax aggressiveness*

A. Pendahuluan

Suatu negara dapat dikatakan berkembang atau tidak dapat dilihat dari perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Pendapatan negara di Indonesia sendiri terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dari total pendapatan negara pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.750,3 Triliun salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan negara itu sendiri yakni dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Angka ini baru 89,7% atau setara dengan Rp. 1.151 Triliun dari target tahun 2017 sebesar Rp. 1.283,6 T. Bahkan Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp. 1.424 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak masih menjadi pemasukan utama APBN di Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui, pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa tanpa kita men-

dapatkan secara langsung manfaatnya. Pajak sendiri merupakan unsur penting dalam pembangunan sebuah negara. Dengan pajak diharapkan akan meningkatkan perekonomian negara serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dibalik keuntungan yang didapat dari pajak, pajak sendiri masih dianggap sebagai beban bagi wajib pajak pribadi maupun badan. Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perusahaan akan terdorong untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut atau apabila memungkinkan bahkan untuk menghilangkan beban pajak tersebut (Hadi dan Mangoting, 2014).

Frank dalam Monika dan Ratmono (2015), menjelaskan agresivitas pajak perusahaan sebagai suatu tindakan dalam merekayasa pendapatan kena pajak melalui cara-cara dalam perencanaan pajak baik yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut melanggar aturan yang ada.

Corporate social responsibility (CSR) biasanya dikaitkan dengan strategi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan atau *image* baik di mata masyarakat. Lanis (2012) dalam Monika dan Ratmono (2015) menganggap CSR sebagai salah satu faktor untuk menuju keberhasilan serta kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan perusahaan tidak terlepas dari interaksi dengan masyarakat sekitar. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017) menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Perusahaan akan

cenderung semakin agresif sejalan dengan semakin luasnya pengungkapan CSR oleh perusahaan.

Pada dasarnya struktur kepemilikan dalam perusahaan terbagi menjadi dua yakni kepemilikan keluarga dan kepemilikan non-keluarga. Dalam struktur kepemilikan non-keluarga menunjukkan perbandingan yang seimbang antara pemilik perusahaan dan manajerial. Chen *et al* (2010) mengemukakan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi dibanding perusahaan keluarga. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara pemilik perusahaan dan manajerial maka hal tersebut memungkinkan untuk terjadinya konflik keagenan (Hadi, 2014). Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan memiliki keleluasaan dalam memaksimalkan laba sehingga dapat menimbulkan agresivitas pajak. Sementara pada perusahaan keluarga, pemilik lebih memilih untuk membayar pajak yang tinggi daripada rusaknya reputasi mereka karena hasil audit dari fiskus pajak.

Menurut Scott (2000) dalam Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa perpajakanlah salah satu motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba. Semakin besar laba perusahaan maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung untuk tetap menjaga labanya pada tingkatan tertentu untuk menghindari beban pajak yang meningkat. Selain faktor-faktor diatas peningkatan *leverage* juga turut mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan (Setiawan, 2006 dalam Tiaras dan Wijaya, 2015). Namun penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2007) menunjukkan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya kasus penggelapan maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Dalam catatannya, pada tahun 2017 dari total 16,6 juta wajib pajak yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), baru sebanyak 12,05 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT. Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), diduga setiap tahun terdapat angka penghindaran pajak sebesar Rp110 triliun. Penghindaran pajak ini sebagian besar berasal dari wajib pajak badan sekitar 80 persen dan sisanya adalah wajib pajak perorangan. Dimana sebagian besar ini merupakan badan usaha yang bergerak di sektor minerba (mineral dan batubara). Namun selain itu juga banyak dari perusahaan asing. Selanjutnya terdapat pula perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh asing.

Nama Gayus Tambunan pasti sudah tidak asing bagi kita. Gayus Tambunan terjerat kasus penerimaan suap terkait dengan pengurusan permohonan keberatan pajak. Hal ini merupakan salah satu cara perusahaan menghindari dari membayar pajak yaitu dengan menyuap pegawai pajaknya. Gayus Tambunan terbukti menerima suap sebesar Rp 925 juta rupiah dari Roberto Santonius terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart. Selain itu ia juga menerima 3,5 juta dollar Amerika dari Alif Kuncoro terkait kepengurusan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resource.

Kemenkeu menjelaskan bahwa potensi PPh pada sektor pertambangan sebesar 140,96 triliun tetapi yang dapat direalisasikan hanya sebesar 43,48 triliun. Hal ini berarti hanya sebesar 30,8% saja yang diterima negara

sedangkan 70,2% hilang karena banyaknya perusahaan yang belum membayar pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan bahwa selama ini perusahaan-perusahaan pertambangan di sektor mineral batubara (Minerba) tidak patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Berdasarkan data dari 2011 lalu, dari 3.037 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas, ada 2.900 wajib pajak yang tidak lapor SPT. Sementara pada 2015, wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas yang melapor SPT hanya 2.500. Sedangkan 3.600 wajib pajak lainnya tidak lapor SPT. Dampak dari pelemahan ekonomi global yang ada dijadikan alasan oleh para pengusaha tambang mineral dan batubara terkait rendahnya pembayaran pajak dari sektor pertambangan selama ini.

Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian ini bermaksud untuk mengintegrasikan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya serta untuk menganalisis kembali pengaruh yang ditimbulkan oleh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), struktur kepemilikan, manajemen laba, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 hingga 2017.

B. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan. Kerangka pemikiran

dibutuhkan guna untuk meyakinkan sesama peneliti dengan alur pikir yang logis agar membuahkan kesimpulan berupa hipotesis.

1. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan Leverage Secara Simultan Terhadap Agresivitas Pajak*

Terdapat beberapa faktor-faktor yang turut mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan yakni *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat mendongkrak *image* atau reputasi perusahaan di mata perusahaan sehingga perusahaan dapat melebarkan bisnisnya lebih jauh lagi. Selain itu dengan kegiatan CSR juga dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan lainnya antara lain adalah struktur kepemilikan perusahaan. Hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia untuk kepemilikan sahamnya sebagian besar masih dimiliki oleh anggota keluarga. Anggota keluarga yang mana merupakan pemegang saham mayoritas mempunyai suara maupun pengaruh yang besar dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba yang besar. Semakin besar keuntungan atau laba yang didapat maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan kepemilikan keluarga dimana anggota keluarga sebagai pemegang saham mayoritas untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang

untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan.

Selain itu agresivitas pajak juga dapat disebabkan oleh manajemen laba. Salah satu motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu motivasi perpajakan. Dalam praktiknya manajer melaporkan posisi keuangan perusahaan yang tidak sebenarnya. Manajer juga dapat mengubah atau bahkan menghilangkan beberapa informasi mengenai transaksi-transaksi yang ada di perusahaan sebelum melaporkannya kepada pihak di atasnya (pemegang saham, dll). Motivasi serta peluang yang ada dapat mendorong manajer untuk melakukan agresivitas pajak.

Kemudian selain tiga faktor di atas, *leverage* juga dapat menyebabkan terjadinya agresivitas pajak dalam perusahaan. Penambahan *leverage* atau rasio utang dalam perusahaan dapat mengurangi beban pajak. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah utang ini akan memunculkan beban bunga yang harus dibayar. Komponen beban bunga ini yang kemudian dapat mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang.

H1 : Diduga pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan Leverage berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak

2. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak*

Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk etika dan tanggung jawab perusahaan atas segala aktivitas perusahaan

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan CSR dapat dilakukan di berbagai bidang baik di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan, maupun di bidang pendidikan. Pelaksanaan CSR merupakan wujud dari bentuk perhatian dan partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Gunawan, 2017). Pengungkapan CSR dapat berdampak positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Selain itu pengungkapan CSR juga bermanfaat dalam meningkatkan keuntungan di masa depan (Gunawan, 2017).

Pada penelitian milik Damayanti (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya PMK No.76 tahun 2011 bahwa batasan biaya CSR yang dapat dikurangkan penghasilan bruto sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR-nya untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi sekaligus menjadi alat bagi perusahaan dalam memasarkan merknya.

H2 : Diduga pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak

3. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak*

Aryani (2011) dalam Hadi dan Mangoting (2014) membagi konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan menjadi dua yaitu kepemilikan menyebar atau kepemilikan non-keluarga dan kepemilikan terkonsentrasi atau kepemilikan keluarga. Di Indonesia sendiri kepemilikan saham perusahaan masih didominasi oleh pihak keluarga. Struktur kepemilikan

keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak tertentu (pendiri perusahaan dan atau anggota keluarganya). Dalam struktur kepemilikan keluarga, bagian manajemen perusahaan juga dikelola dan dikontrol oleh pihak keluarga karena anggota keluarga menempati posisi-posisi penting di perusahaan. Karena merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan, kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh serta hak suara yang besar dalam perusahaan.

Hasil penelitian milik Endrianto, dkk (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Chen *et al* (2010) dalam Hadi dan Mangoting (2014) dimana perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki tingkat kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak yang lebih rendah daripada perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar. Pada perusahaan kepemilikan keluarga cenderung lebih peduli untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, perusahaan keluarga juga memilih menghindari resiko untuk membayar denda atau sanksi akibat melakukan agresivitas pajak, serta rusaknya reputasi perusahaan akibat adanya temuan dari pemeriksaan pajak oleh fiskus.

H3 : Diduga struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

4. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak

Scott, 2015 (dalam Firmansyah dan Surahman, 2017) menjelaskan manajemen laba sebagai sebuah tindakan yang digunakan manajer dalam melaporkan keuntungan atau laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi maupun perusahaan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi. Salah satu dari tujuh motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba merupakan motivasi pajak (*taxation motivation*). Motivasi dan peluang yang ada memungkinkan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaannya. Manajemen laba terjadi ketika dalam melaporkan keuangan dan transaksi yang ada di perusahaan manajer menggunakan *judgement*-nya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat menimbulkan *misleading* bagi pihak investor maupun pemangku kepentingan yang lain (misal otoritas pajak) mengenai tentang performa perusahaan yang sebenarnya (Healy dan Wahlen, 1999 dalam Firmansyah dan Surahman, 2017).

Praktik manajemen laba terbagi menjadi dua jenis, yaitu manajemen laba riil dan manajemen laba akrual. Manajemen laba riil didefinisikan sebagai sebuah tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek bisnis yang seharusnya dengan tujuan utama untuk mencapai target laba. Adapun tindakan-tindakan yang termasuk kedalam manajemen riil meliputi manipulasi penjualan, penurunan beban diskresioner dan produksi yang berlebihan.

Firmansyah dan Surahman (2017) menjelaskan bahwa dalam unsur manajemen laba yang agresif terkandung unsur akrual diskresioner

yang sarat dengan ketidakpastian yang akan berdampak pada semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba kena pajak. Hal ini disebabkan perusahaan dapat memilih metode dan estimasi akuntansi yang menyebabkan perbedaan atau melakukan transaksi yang bukan pengurang atau subyek pajak penghasilan (perbedaan permanen) secara agresif sehingga perusahaan dapat melaporkan laba yang tinggi dan pajak minimum secara bersamaan pada periode berjalan.

Hasil penelitian milik Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan melakukan *income increasing* untuk menjaga indikator kinerja perusahaan tetap dan menekan tarif pajak efektif perusahaan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku yaitu sebesar 25% dari laba bersih sebelum beban pajak penghasilan.

H4 : Diduga manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak

5. Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage (struktur utang) didefinisikan sebagai sebuah rasio yang menunjukkan besarnya utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penambahan jumlah utang ini akan memunculkan beban bunga yang harus dibayar, komponen beban bunga ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga beban pajak yang harus dibayar akan berkurang. Hal ini membuat peru-

sahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Semakin besar perusahaan maka akan lebih mempertimbangkan lagi risiko dalam hal pengelolaan beban pajaknya. Perusahaan besar cenderung lebih memilih untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya daripada pembiayaan yang berasal dari utang. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar pula biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Pada penelitian milik Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil tersebut diketahui bahwa perusahaan sampel tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak meskipun perusahaan akan memperoleh insentif pajak atas bunga pinjaman. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 dimana perusahaan yang memiliki utang yang tinggi akan memperoleh insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman.

H5 : Diduga leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Kriteria seleksi sampel yang digunakan pada penelitian ini antara lain : (1) Merupakan perusahaan pertambangan pada sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017; (2) Bukan merupakan perusahaan pertambangan batubara yang delisting selama periode penelitian tahun 2013-2017; (3) Perusahaan pertambangan batubara yang menyajikan *Annual Report* selama periode penelitian tahun 2013-2017; (4) Perusahaan pertambangan batubara yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2013-2017; (5) Perusahaan yang memiliki nilai CETR antara 0 sampai 1 untuk memudahkan perhitungan.

Setelah dilakukan seleksi dengan lima pertimbangan diatas, maka didapat sampel penelitian sebanyak 6 perusahaan. Dengan jangka waktu penelitian selama lima tahun maka diperoleh total jumlah observasi penelitian yang akan dilakukan yaitu sebanyak 30 data. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Agresivitas Pajak

Frank dalam Monika dan Ratmono (2015), menjelaskan agresivitas pajak perusahaan sebagai suatu tindakan dalam merekayasa pendapatan kena pajak melalui cara-cara dalam perencanaan pajak baik yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun cara yang tergolong ilegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Cara mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR menggambarkan persentase total pajak penghasilan yang sesungguhnya

nya dibayarkan perusahaan dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak. Proksi CETR dinilai menjadi indikator tingkat agresivitas pajak apabila nilainya semakin mendekati nol. Semakin rendah CETR yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. CETR yang rendah juga dapat menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan lebih kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

2. Corporate Social Responsibility

CSR merupakan wujud dari bentuk perhatian dan partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengukuran pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai proper pada tiap perusahaan. Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995 untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungannya.

Peringkat Warna	Keterangan	Nominal
Proper Emas	Sangat Sangat Baik	5
Proper Hijau	Sangat Baik	4
Proper Biru	Baik	3
Proper Merah	Buruk	2
Proper Hitam	Sangat Buruk	1

3. Struktur Kepemilikan Perusahaan

Struktur kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak keluarga, baik berhubungan darah atau karena pernikahan yang kepemilikan > 5% wajib dicatat (kepemilikannya tercatat). Kepemilikan keluarga terdapat dalam dimensi laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kepemilikan Perusahaan} &= \frac{\text{Jumlah saham pihak keluarga}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\% \end{aligned}$$

4. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan sebuah tindakan yang digunakan manajer dalam melaporkan keuntungan atau laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi maupun perusahaan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi. Manajemen laba pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals* (DA). Dalam menghitung *discretionary accruals* digunakan *Modified Jones Model* dimana membagi total akrual menjadi dua, yaitu komponen *non-discretionary accruals* dan komponen *discretionary accruals*. Model perhitungannya antara lain sebagai berikut:

a. Mengukur *total accruals* yang dihitung dengan rumus:

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

- b. Nilai *accruals* diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 \left(1/A_{it-1} \right) + \alpha_2 \left((REV_{it}-REV_{it-1})/A_{it-1} \right) + \left(\alpha_3 PPE_{it}/A_{it-1} \right)$$

- c. Menghitung *non-discretionary accruals* dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it+1}} \right) + \alpha_2 \{ [(REV_{it} - REV_{it-1}) - (REC_{it} - REC_{it-1})] / A_{it-1} \} + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

- d. Menghitung nilai *discretionary accruals* dengan rumus:

$$DA_{it} = \left(TA_{it}/A_{it-1} \right) - NDA_{it}$$

Keterangan :

TA _{it} :	total <i>accruals</i> perusahaan i pada periode ke t	REV _{it-1} :	pendapatan perusahaan i tahun t-1
N _{it} :	laba bersih perusahaan i pada keriode ke t	PPE _{it} :	jumlah aktiva tetap (<i>property, plant and equipment</i>) perusahaan i pada akhir tahun t
CFO _{it} :	aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t	NDA _{it} :	<i>non-discretionary accrual</i> perusahaan i pada tahun t
A _{it-1} :	total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1	REC _{it} :	piutang perusahaan i pada tahun t
REV _{it} :	pendapatan perusahaan i tahun t	REC _{it-1} :	piutang perusahaan i pada tahun t-1

Semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan dalam melakukan manajemen laba maka nilai *discretionary accruals* akan semakin mendekati nol. Apabila manajemen laba dilakukan dengan meningkatkan laba perusahaan hal tersebut berarti bahwa *discretionary accruals* menunjukkan nilai yang positif. Dan apabila *discretionary accruals* menunjukkan nilai negatif berarti manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba perusahaan.

5. Leverage

Leverage (struktur utang) merupakan sebuah rasio yang menunjukkan besarnya utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Penambahan jumlah utang ini akan memunculkan beban bunga yang harus dibayar, komponen beban bunga ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga beban pajak yang harus dibayar akan berkurang.

Analisis Data Dan Uji Hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang sebelumnya perlu dilakukan statistik

deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis menggunakan SPSS versi 23.0.

D. Hasil

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR X1	30	3,00	5,00	4,0000	,74278
Kepemilikan Keluarga X2	30	,50	,93	,7051	,13254
Manajemen Laba X3	30	-,08	,16	,0015	,04377
Leverage X4	30	,14	,58	,3788	,11806
Tingkat Agresivitas Pajak Y	30	,24	,55	,3301	,07942
Valid N (listwise)	30				

- a. CSR menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,000. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 telah memperoleh peringkat PROPER rata-rata yang baik yaitu peringkat Hijau. Hal ini berarti bentuk pertanggung jawaban perusahaan sudah baik terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan untuk nilai minimum adalah 3,000 yakni peringkat Biru dan nilai maksimum yaitu 5,000 dimana merupakan peringkat tertinggi yakni peringkat Emas. Kemudian untuk standar deviasinya yakni sebesar 0,74278.
- b. Kepemilikan Keluarga menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebanyak 0,7051. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 dengan jumlah saham pihak keluarga dari jumlah saham beredar dengan hasil lebih dari 50% memiliki kecenderungan akan melakukan tindakan pajak agresif. Sedangkan untuk nilai minimum sebesar 0,50, nilai maksimum sebesar 0,93, dan standar deviasi sebesar 0,13254.
- c. Manajemen laba menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0015. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 semakin kecil kemungkinannya dalam melakukan manajemen laba. Sedangkan untuk nilai minimum sebesar -0,08, nilai maksimum sebesar 0,16, dan standar deviasi sebesar 0,04377.

- d. *Leverage* menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3788. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 memiliki utang sebesar 0,39 USD untuk setiap 1 USD aset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk nilai minimum sebesar 0,14, nilai maksimum sebesar 0,58, dan standar deviasi sebesar 0,11806.
- e. Tingkat agresivitas pajak menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3301 atau 33,01% dari total 30 observasi. Hal ini menunjukkan bahwa beban rata-rata pajak perusahaan

pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 adalah sebanyak 33,01% dari laba sebelum pajak.

2. *Uji Asumsi Klasik*

Asumsi klasik yang yang perlu diuji pada penelitian ini meliputi uji normalitas, heterokedasrisitas, auto-korelasi, dan multikolonieritas.

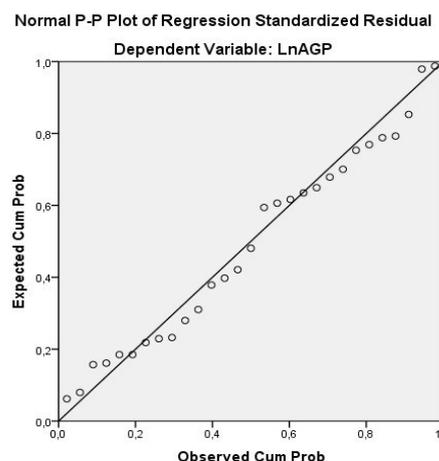
Uji Normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016).

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		29	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,20625497	
Most Differences	Extreme Absolute	,096	
	Positive	,096	
	Negative	-,084	

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai *kolmogorov-smirnov* yaitu 0,096 dan signifikansinya yaitu 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal, karena memiliki tingkat signifikansinya diatas 0,05 ($0,200 > 0,05$) yang berarti model regresi tidak memiliki masalah normalitas dan atau data yang digunakan terdistribusi secara normal. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui grafik normal *p-plot*.

Gambar 1. Grafik Normal P-Plot



Berdasarkan gambar diatas, diketahui titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal. Hal ini

menunjukkan bahwa berdasarkan gambar diatas diketahui residual telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)* (Ghozali,2016). Hasil dari uji multikolonieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

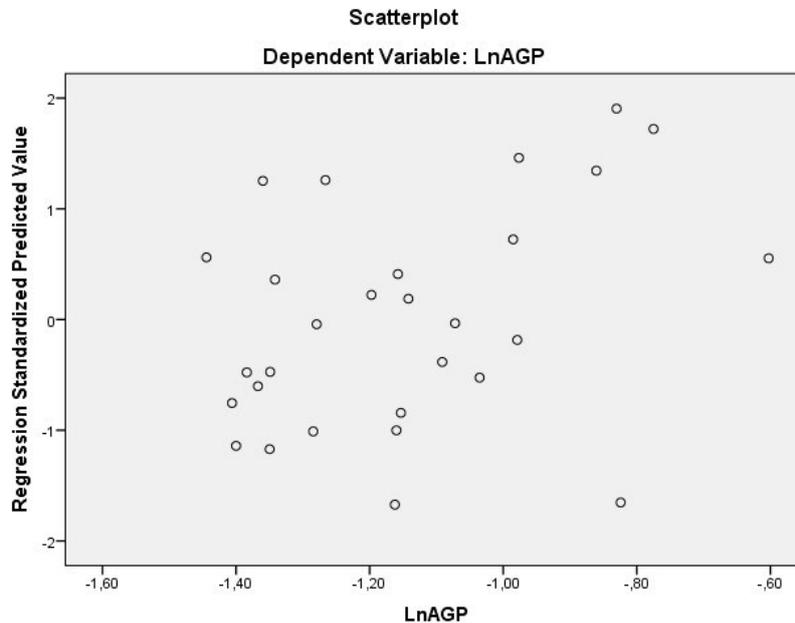
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<u>LagCSR</u>	,846	1,181
LagKep	,928	1,078
<u>LagML</u>	,900	1,111
LagLev	,945	1,059

Berdasarkan output spss diatas, menunjukkan variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,846 nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 1,181. Kepemilikan keluarga memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,928 dan nilai VIF sebesar 1,078. Manajemen laba memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,900 dan nilai VIF sebesar 1,111. Dan *leverage* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,945 dan nilai VIF sebesar 1,059. Karena seluruh variabel menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar

variabel independen dalam model penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Metode yang digunakan yaitu dengan melihat Grafik *ScatterPlot* antara SPRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah *di-studentized* (Ghozali,2016). Hasil dari uji heterokedastisitas antara lain sebagai berikut :

Gambar 2. Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan output spss diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Agresivitas Pajak berdasarkan masukan variabel independen *Corporate Social Responsibility*, Stuktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan *Leverage*.

Uji Autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW) (Ghozali,2016). Adapun hasil dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b
	Durbin-Watson
1	1,338 ^a

Berdasarkan output spss diatas, hasil nilai DW pada hasil uji autokorelasi tersebut adalah 1,338. Suatu model regresi dapat dikatakan tidak ada autokorelasi apabila mempunyai kriteria dimana $dU < d < 4-dU$. Untuk alpha sebesar 5%, variabel independen sebanyak 4 ($k=4$), dan sampel sebanyak 30 ($n = 30$), maka diperoleh batas atas (dU) sebesar 1,7386 dan batas bawah (dL) sebesar 1,1426. Dengan demikian diperoleh *Durbin-Watson* hitung berada diantara dL dan dU sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya autokorelasi positif dalam penelitian ini.

Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil uji autokorelasi

yang diinginkan maka dilakukan transform pada variabel-variabel tersebut. Variabel Y (Agresivitas Pajak) diubah kedalam bentuk logaritma natural dan variabel X diubah kedalam bentuk Lag. Setelah dilakukan analisis regresi kembali hasil yang didapat masih jauh dari yang diharapkan atau masih terdapat autokorelasi. Oleh karena itu dilakukan Lag pada variabel *unstandardized residuals*. Berikut hasil uji autokorelasi setelah dilakukan transform pada variabel-variabelnya :

Tabel 5. Uji Autokorelasi Setelah Transform Data

Model	Durbin-Watson
1	1,778

Berdasarkan hasil uji auto-korelasi setelah dilakukannya transform data didapat nilai DW sebesar 1,778. Sehingga nilai ini lebih besar dari batas atas (d_U) namun tidak lebih besar dari $4-d_U$ ($d_U < d < 4-d_U$). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda. Pada penelitian ini, pengolahan data yang digunakan yaitu analisis linier berganda versi 23.0 dengan variabel dependen Agresivitas Pajak dan variabel independen meliputi *corporate social responsibility*, struktur kepemilikan, manajemen laba, dan *leverage*.

Tabel 4.7

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,775	,313		-2,474	,021
	LagCSR	-,048	,063	-,158	-,763	,453
	LagKep	-,471	,343	-,272	-1,375	,182
	LagML	-,071	1,037	-,014	-,068	,946
	LagLev	,393	,367	,210	1,071	,295

Berdasarkan output spss diatas, diperoleh koefisien untuk *Corporate Social Responsibility* (X1), Struktur Kepemilikan (X2), Manajemen Laba (X3), dan *Leverage* (X4), didapat hasil persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$AGP_{it} = -0,775 - 0,048X_1 - 0,471X_2 - 0,071X_3 + 0,393X_4 + e$$

- a. Variabel *Corporate Social Responsibility* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,048 dengan tanda negatif, yang mana menyatakan setiap peningkatan peringkat proper yang diperoleh perusahaan, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan menurun sebesar 0,048 dengan asumsi Struktur Kepemilikan, Manaje-

- men Laba, dan *Leverage* tetap atau konstan, sehingga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- b. Variabel Struktur Kepemilikan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,471 dengan tanda negatif, yang mana menyatakan setiap peningkatan 1 lembar saham perusahaan keluarga, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan menurun sebesar 0,471 dengan asumsi *Corporate Social Responsibility*, Manajemen Laba, dan *Leverage* tetap atau konstan, sehingga Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 - c. Variabel Manajemen Laba menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,071 dengan tanda negatif, yang mana menyatakan setiap perubahan 1 satuan dalam manajemen laba, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan menurun sebesar 0,071 dengan asumsi *Corporate Social Responsibility*, Struktur Kepemilikan, dan *Leverage* tetap atau

konstan, sehingga Manajemen Laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

- d. Variabel *Leverage* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,393 dengan tanda positif, yang mana menyatakan setiap kenaikan *leverage* 1 satuan, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0,393 dengan asumsi *Corporate Social Responsibility*, Struktur Kepemilikan, dan Manajemen Laba tetap atau konstan, sehingga *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,2016). Hasil dari uji statistik F antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,178	4	,044	,896	,482 ^b
Residual	1,191	24	,050		
Total	1,369	28			

a. Dependent Variable: LnAGP

b. Predictors: (Constant), LagLev, LagML, LagKep, LagCSR

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 23.0 (2018)

Berdasarkan output spss versi 23.0 pada Tabel 4.8 diatas, dari hasil uji ANOVA atau F Test didapat nilai F hitung sebesar

0,896 dengan probabilitas 0,482. Karena probabilitas jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan hipotesis ditolak atau

Corporate Social Responsibility, Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan *Leverage* tidak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap agresivitas pajak.

b. Uji Statistik T

Uji statistik T merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali,2016). Perhitungan pada uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan taraf signifikan α (0,05). Hasil uji parsial tersebut juga dapat dilihat pada Tabel 4.5 :

1) H2 : Diduga pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel *Corporate Social Responsibility* menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,763. Sedangkan tingkat signifikansinya sebesar 0,453 yakni lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H2 ditolak.

2) H3 : Diduga Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel Struktur Kepemilikan menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,375. Sedangkan tingkat signifikan-

sinya sebesar 0,182 yakni lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H3 ditolak.

3) H4 : Diduga Manajemen Laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel Manajemen Laba menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,068. Sedangkan tingkat signifikansinya sebesar 0,946 yakni lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H4 ditolak.

4) H5 : Diduga *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel *Leverage* menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,071. Sedangkan tingkat signifikansinya sebesar 0,295 yakni lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H5 ditolak.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,360 ^a	,130	-,015	,22278

a. Predictors: (Constant), LagLev, LagML, LagKep, LagCSR

b. Dependent Variable: LnAGP

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 23.0 (2018)

Berdasarkan output spss versi 23.0 pada Tabel 4.9 diatas, dari hasil uji koefisien determinasi yang telah diolah, didapat nilai R Square dan $Adjusted R^2$ masing-masing sebesar 0,130 dan -0,015. Hal ini berarti variabel-variabel dependen (agresivitas pajak) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (*Corporate Social Responsibility*, Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan *Leverage*) sebesar 13% saja dan sisanya sebesar 87% dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang lain diluar model penelitian ini.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Secara simultan *Corporate Social Responsibility*, Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan uji yang dilakukan didapat tingkat signifikan yang lebih besar dari standar yang telah ditetapkan (0,05), maka dari itu dapat dikatakan hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh secara bersama-sama (simultan).
- b. Secara parsial setelah dilakukannya uji didapat variabel *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- c. Secara parsial setelah dilakukannya uji didapat variabel Struktur

Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

- d. Secara parsial setelah dilakukannya uji didapat variabel Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- e. Secara parsial setelah dilakukannya uji didapat variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Saran

Adapun saran-saran yang mampu diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencoba pada perusahaan yang bergerak di sektor selain sektor pertambangan batubara sebagai objek penelitian.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain sebagai variabel independen seperti likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah auditor internal dan lain sebagainya.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan seperti *Effective Tax Rate* (CETR) atau *Book Tax Difference* (BTD). Dapat pula dilakukan perbandingan hasil antara dua proksi pengukuran agresivitas pajak yang berbeda untuk melihat proksi mana yang lebih baik untuk menggambarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., dan Purwaningsih, A. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *MODUS Vol.26* (1): 33-50. Cahyani, Risma. 2016. *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61.
- Damayanti, Della. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Cendekia Akuntansi Volume 5 No. 2*.
- Darmawan, I.G.H. dan Sukartha, I.M., 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, pp.143-161.
- Endrianto, S. A., Puji, A. T., Rahmawati, & Rika, S. S. 2017. Kepemilikan Keluarga Dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember*.
- Firmansyah, A., dan Surahman, A. 2017. Pengaruh Manajemen Laba Melalui Kecurangan Akuntansi, Aktivitas Laba Riil Dan AkruaI Terhadap Agresivitas Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Jakarta : Salemba Empat. Gunawan, J., 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), pp.425-436
- Hadi, J. dan Mangoting, Y., 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Hadi, Nor. 2010. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Narsa, N. P. D. R. H., & Isnalita, I. 2014. Keterterapan SAK ETAP Pada Koperasi Serta Persepsi Pelaku Koperasi Dan Akuntan Pendidik. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram*.
- Nurul Faizah, Ika. 2016. *Pengaruh Kepemilikan Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Pajak Agresif*. Tegal : Universitas Pancasakti.
- Ratmono, D. dan Sagala, W.M., 2015. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sara na Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2).
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyanto, K.D. dan Supramono, S., 2012. Likuiditas, Leverage, Komisariss Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).

- Tiaras, I. dan Wijaya, H., 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), pp.380-397.
- Turner, Lynn. 2007. *Corporate Governance Post-Sarbanes-Oxley: Regulations, Requirements, and Integrated Processes*. John Willey & Sons, Inc.